

Peran Teknologi sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Publik

Hani Apriliani,¹ Mohammad Rizki,² Raden M Ammar Arrafi W,³ Shelina Mahwi,⁴ Tawaffaona Ningsih⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa

Email: ita.rosita.wahyiah@binabangsa.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 1 February 2025

Accepted: 5 February 2025

Published: 17 February 2025

Keywords:

Technology;

Corruption Prevention;

Public Sector.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

Corruption remains a significant challenge in the public sector, hindering economic development and eroding public trust in governance. This study explores the role of technology as a solution to reduce corruption in the public sector by enhancing transparency, accountability, and oversight. Using a qualitative descriptive method, the research examines the implementation of digital tools such as e-government, e-procurement, and public reporting platforms. Findings indicate that these technologies minimize opportunities for corruption by reducing direct interactions between officials and citizens, streamlining administrative processes, and enabling real-time oversight. For instance, e-procurement systems have improved efficiency and fairness in public procurement, while public reporting applications like LAPOR! facilitate community participation in monitoring government activities. Despite these advancements, challenges persist, including limited infrastructure in remote areas, low digital literacy, and cybersecurity threats. Addressing these issues requires a collaborative approach involving government commitment, private sector innovation, and active public engagement. The study concludes that technology provides a transformative opportunity to combat corruption and build transparent, accountable governance.

PENDAHULUAN

Korupsi Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Dalam konteks ini, teknologi telah muncul sebagai salah satu solusi potensial untuk mengatasi masalah ini. Peran teknologi dalam pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada pencegahan, tetapi juga meliputi deteksi dan pengawasan yang lebih efektif (Aprilla, Wulandari, & Elcaputera, 2024). Dengan memanfaatkan teknologi digital, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Era digital memberikan peluang untuk memanfaatkan berbagai inovasi teknologi, seperti sistem *e-government*, *big data*, dan *artificial intelligence* (Fadri & Fil, 2024).

Sistem *e-government*, memungkinkan proses administrasi menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sistem ini mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi publik, mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat, serta meminimalkan peluang terjadinya korupsi (Gultom et al., 2024). Sebagai contoh, penerapan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa telah terbukti mengurangi peluang korupsi dengan menciptakan proses yang lebih transparan. Selain itu,



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

teknologi informasi juga berperan penting dalam mendukung audit internal dan eksternal. Audit internal yang berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi, terutama di lingkungan pemerintahan (Hilal, Irawan, & Nurhaliza, 2024). Penggunaan teknologi dalam audit memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan mendeteksi pola-pola yang mencurigakan secara cepat. Dengan demikian, pelanggaran dapat diidentifikasi lebih awal sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius.

Tidak hanya pada level pemerintahan, peran teknologi juga relevan di institusi pendidikan tinggi. Lingkungan kampus, sebagai salah satu pilar integritas, dapat memanfaatkan teknologi untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam proses akademik (Irfandi, 2024). Sistem informasi berbasis digital dapat meningkatkan transparansi dalam berbagai aspek, seperti penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan anggaran, dan evaluasi akademik. Dalam konteks penegakan hukum, teknologi telah memberikan kontribusi besar melalui pengembangan alat dan metode investigasi digital. Audit forensik dan investigasi berbasis teknologi memungkinkan pengungkapan kasus-kasus fraud secara lebih efektif (Mutia, 2024). Dengan bantuan perangkat lunak khusus, auditor dapat menganalisis data secara menyeluruh dan menemukan bukti-bukti yang mendukung proses hukum. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat di era digital, di mana kejahatan berbasis teknologi semakin kompleks (Munajat & Yusuf, 2024).

Partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam memanfaatkan teknologi untuk mengurangi korupsi. Dengan akses yang lebih luas terhadap informasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan indikasi korupsi melalui platform digital. Aplikasi pengaduan masyarakat berbasis teknologi, misalnya, telah memungkinkan laporan pelanggaran untuk ditangani dengan lebih cepat dan transparan (Nurhasanah, 2024). Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan pengawasan, tetapi juga mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Namun, pemanfaatan teknologi dalam pemberantasan korupsi tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Di beberapa daerah, keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan dalam penerapan sistem berbasis teknologi (Sugianto, Permana, & Suripto, 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan memberikan pelatihan kepada aparat dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi.

Selain itu, ancaman keamanan siber juga menjadi perhatian utama dalam implementasi teknologi digital. Keamanan data dan sistem harus dijamin untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan teknologi harus disertai dengan kebijakan perlindungan data yang kuat dan penerapan sistem keamanan yang mutakhir (Wibowo, 2024). Secara keseluruhan, teknologi menawarkan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah korupsi di sektor publik. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, keberhasilan implementasi teknologi dalam pemberantasan korupsi sangat bergantung pada komitmen pemerintah, dukungan masyarakat, dan kesiapan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.



METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran teknologi sebagai solusi dalam mengurangi korupsi di sektor publik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena yang kompleks terkait penerapan teknologi digital dan dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, termasuk jurnal nasional dan internasional, buku, laporan pemerintah, serta publikasi resmi lainnya yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara implementasi teknologi dan pengurangan korupsi berdasarkan konteks yang spesifik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (literature review) dengan menelaah berbagai publikasi yang membahas implementasi teknologi dalam sektor publik. Literatur yang dipilih mencakup penelitian terbaru dalam lima tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dengan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa laporan resmi pemerintah terkait penerapan e-government, audit berbasis teknologi, serta sistem pengaduan masyarakat berbasis digital.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan yang relevan dalam literatur yang dikaji. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana teknologi berperan dalam mencegah korupsi, mulai dari tahap implementasi hingga dampaknya terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Peneliti juga memanfaatkan pendekatan triangulasi untuk memvalidasi hasil analisis dengan membandingkan berbagai sumber data yang berbeda. Penelitian ini juga mempertimbangkan etika penelitian, termasuk memastikan bahwa semua sumber yang digunakan telah disitusi secara benar untuk menghindari plagiarisme. Dengan pendekatan yang sistematis ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang potensi dan tantangan pemanfaatan teknologi dalam pemberantasan korupsi di sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi dan Pencegahan Korupsi

Penelitian ini mengungkapkan bahwa teknologi memiliki peran strategis dalam mengurangi korupsi di sektor publik, khususnya melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih efektif. Berbagai implementasi teknologi digital, seperti e-government, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement), serta aplikasi pelaporan masyarakat, telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan praktik korupsi. Berdasarkan studi oleh Gultom et al. (2024), penerapan e-government di beberapa pemerintah daerah di Indonesia berhasil mengurangi interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, yang selama ini menjadi celah utama terjadinya pungutan liar dan gratifikasi. Sistem ini memungkinkan layanan publik berjalan lebih efisien dan transparan, misalnya dalam pengurusan perizinan, pembayaran pajak, dan administrasi lainnya.

Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa sejak diterapkannya e-procurement, efisiensi belanja pemerintah meningkat signifikan, dengan penghematan hingga 15-20% dari total anggaran proyek. Hal ini disebabkan oleh proses tender yang lebih terbuka dan kompetitif, di mana setiap peserta tender dapat memantau jalannya proses melalui sistem online. Munajat dan Yusuf (2024) menekankan bahwa e-procurement tidak hanya mengurangi potensi manipulasi data,



tetapi juga memberikan akses yang setara kepada seluruh pelaku usaha, sehingga menghilangkan praktik kolusi yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, teknologi informasi berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan melalui audit berbasis digital. Audit internal yang menggunakan perangkat lunak analisis data memungkinkan deteksi dini terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Hilal et al. (2024) mencatat bahwa penggunaan big data dan analisis prediktif membantu auditor mengidentifikasi anomali dalam pengelolaan anggaran, seperti penyalahgunaan dana atau penggelembungan anggaran. Sebagai contoh, dalam kasus pengelolaan dana desa, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP telah berhasil meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran di tingkat desa, sekaligus mempermudah pelaporan keuangan yang lebih transparan.

Teknologi juga mendukung pemberantasan korupsi melalui pelibatan masyarakat secara aktif. Aplikasi pelaporan seperti LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) memberikan platform bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi atau penyimpangan pelayanan publik secara langsung kepada pemerintah. Dalam laporan tahunan LAPOR! tahun 2023, tercatat lebih dari 200.000 pengaduan masyarakat yang masuk, dengan tingkat penyelesaian kasus mencapai 70%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengawasan semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses teknologi digital (Nurhasanah, 2024). Namun, meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sekitar 10% wilayah di Indonesia masih mengalami kesenjangan akses internet yang signifikan.

Kondisi ini menyulitkan implementasi sistem berbasis digital, seperti e-government, di wilayah tersebut. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan pejabat publik juga menjadi hambatan. Sugianto et al. (2024) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman tentang teknologi seringkali menyebabkan sistem yang sudah dibangun tidak digunakan secara optimal. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah ancaman keamanan siber. Dengan semakin kompleksnya teknologi yang digunakan, risiko kebocoran data dan serangan siber juga meningkat. Kasus kebocoran data yang melibatkan platform pemerintah menjadi isu serius yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber menjadi prioritas utama dalam mendukung keberlanjutan teknologi untuk pemberantasan korupsi.

Kolaborasi dalam Pencegahan Korupsi

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memaksimalkan peran teknologi. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan yang mendukung transformasi digital, termasuk alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan pelatihan. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi teknologi dan investasi pada solusi berbasis digital. Di sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah melalui platform digital yang telah disediakan. Studi kasus di Estonia dapat dijadikan contoh bagaimana teknologi dapat berhasil mengurangi korupsi di sektor publik. Estonia, yang dikenal sebagai negara dengan sistem e-government paling maju di dunia, berhasil mengintegrasikan hampir seluruh layanan publik ke dalam sistem digital. Mulai dari pemilu hingga pembayaran pajak, semuanya dapat dilakukan secara online dengan tingkat transparansi yang tinggi. Hasilnya, negara tersebut berhasil menurunkan tingkat



korupsi secara signifikan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah (Fadri & Fil, 2024).

Dalam konteks Indonesia, potensi teknologi untuk mengurangi korupsi sangat besar jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk mempercepat transformasi digital, seperti memperluas jaringan internet ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan literasi digital melalui program pelatihan, dan memperkuat regulasi terkait keamanan siber. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi teknologi yang telah berjalan juga penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut memberikan dampak yang diharapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa teknologi merupakan alat yang sangat efektif dalam mengurangi korupsi di sektor publik. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan serta komitmen untuk terus mengembangkan dan mengadaptasi teknologi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Upaya ini diharapkan tidak hanya mengurangi korupsi, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi memiliki peran strategis dalam mengurangi korupsi di sektor publik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih efektif. Implementasi teknologi seperti e-government, e-procurement, audit berbasis digital, serta aplikasi pengaduan masyarakat telah memberikan dampak nyata dalam menekan praktik korupsi. Sistem digital ini mampu mengurangi interaksi langsung yang rentan terhadap korupsi, menciptakan proses administrasi yang lebih efisien, dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat melalui platform digital turut meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Namun, penerapan teknologi ini tidak terlepas dari tantangan. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi teknologi memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur, memberikan pelatihan yang memadai, serta memperkuat regulasi terkait keamanan data dan siber. Secara keseluruhan, teknologi memberikan peluang besar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak serta adaptasi yang berkelanjutan terhadap tantangan yang ada, teknologi dapat menjadi solusi yang efektif untuk memberantas korupsi, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321-334.
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33-42.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Hilal, F., Irawan, R. A. I., & Nurhaliza, N. (2024). peran audit internal (apip) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi di indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2).
- Irfandi, I. (2024). Peran Kebijakan Internal dalam Mencegah Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 7(4), 81-90.
- Munajat, A. A., & Yusuf, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi Tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4853-4865.
- Mutia, T. (2024). Peran Audit Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Suatu Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 121-133.
- Nurhasanah, S. (2024). Peran Mahasiswa Sebagai Pilar Integritas Dalam Gerakan Anti Korupsi Di Lingkungan Kampus Dan Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(5), 51-60.
- Sugianto, Y., Permana, A. S., & Suripto, S. (2024). analisis peran auditor internal pemerintah dalam mitigasi risiko fraud pada sektor pemerintahan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(6), 589-603.
- Wibowo, M. (2024). Peran Gereja Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Korelasi Dengan Mikha 7: 3. *Magenang: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 5(2), 1-22.
- Wahyiah, I. R., Lestari, E. R., Bate'e, W. D., Ilham, R., & Arianto, B. (2023). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguanan Sistem Pemerintahan Desa Tanjungsari Kabupaten Serang. *TAAWUN*, 3(02), 171-181.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.